

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

a) Tentang Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu institusi penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga sudah diamanatkan oleh undang – undang yaitu tercantum dalam Undang – undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (2), berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yaitu institusi yang mempunyai fungsi koordinasi dan strategis melalui kebijakan dan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, dimana tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas.

b) Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Dalam profil Dinas sosial Kabupaten Bojonegoro mempunyai Visi dan Misi, sebagai berikut :

VISI

“Menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, berdaya saing”

MISI

“Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa”

c) Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mempunyai tujuan dan sasaran untuk pencapaian program dan kegiatan yang sudah direncanakan, sebagai berikut :

TUJUAN

“Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan penanganan PMKS”

Indikator Tujuan : Presentase penurunan PMKS

SASARAN

- 1) Meningkatnya kemampuan PKMS dalam memenuhi kebutuhsn dasarnya

Indikator sasaran : Presentasi PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya

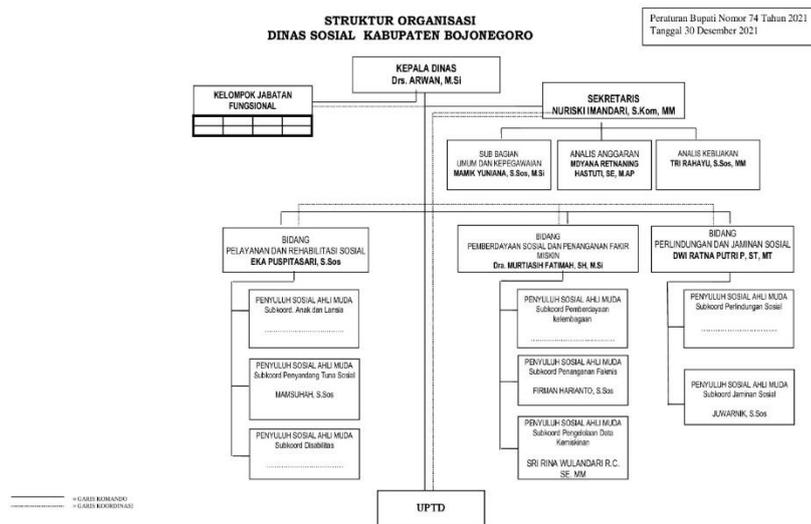
- 2) Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial

Indikator sasaran : presentasi peningkatan PSKS yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

d) Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

GAMBAR 3

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO



Sumber: Dinas Sosial 2021, diakses pada tahun 2024

2. Data Penelitian

a) Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial (Studi Kasus : Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) pada Dinas Sosial di Kabupaten Bojonegoro

Dari hasil pengumpulan data – data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara selama melakukan penelitian Di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis akan menguraikan tentang program rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan indikator Budiani (2007:53) yang terdiri dari Ketepatan sasaran program, Sosialisasi Program, Tujuan program, dan Pemantauan program.

(1) Ketepatan sasaran program

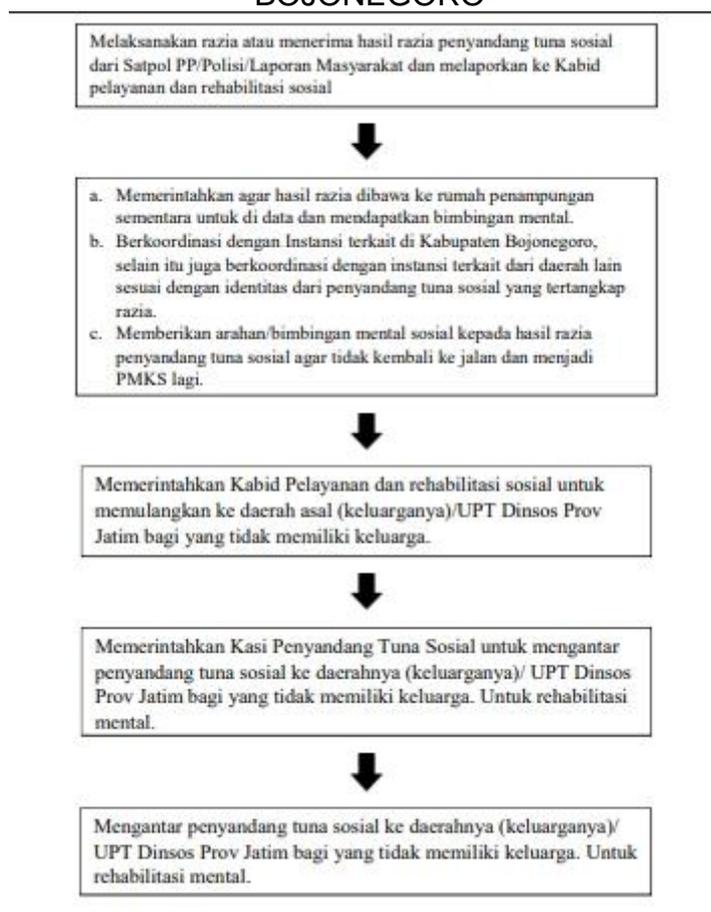
Ketepatan sasaran adalah sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimana suatu program yang diciptakan memiliki tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Dari pernyataan informan melalui wawancara dengan Ibu Eka Puspitasari, S.Sos selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

“....gelandangan dan pengemis itu ada bukan karena orang lain, tetapi mereka ada itu dari diri mereka sendiri. Kenapa mereka juga mengajak saudara, anak mereka sendiri, dan bahkan ada sekeluarga diajak, ya karena bagi mereka penghasilan meminta – minta itu jauh lebih besar dari pada kita yang bekerja di kantor. Untuk kendala sendiri hanya satu

yaitu mindset mereka masih ingin menjadi pengemis dan gelandangan, jadi mau sejauhmana program rehabilitasi di gelontarkan oleh pemerintah ya susah, karena dari pihak pengemis dan gelandangan masih belum ingin berhenti” (hasil wawancara 29 juli 2024).

GAMBAR 3 GAMBAR ALUR SOP PENANGANAN HASIL RAZIA PENYANDANG TUNA SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Pada gambar diatas bahwa Dinas Sosial untuk melakukan penyelesaian masalah telah membuat rencana awal sebaik mungkin, dengan menyesuaikan peraturan yang sudah diterapkan. Untuk memastikan bahwa semua operasi mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan, prosedur

operasional standar (SOP) di atas dibuat. Pada kolom pertama, keterangan Prosedur Operasional Standar (SOP) menunjukkan bahwa tugas tersebut dilakukan oleh seksi pelayanan dan Rehanilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial. Pada kolom kedua, keterangan SOP menunjukkan bahwa tugas tersebut dilakukan oleh Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan pada kolom ketiga, keterangan SOP menunjukkan bahwa tugas tersebut juga dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

GAMBAR 4 PROSES PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PENANGAN PASIEN PKMS

| No. | Program/Kegiatan | Tujuan | Indikator Keberhasilan | Ket. |
|-----|--|---|--|------|
| 1 | Pelayanan Akomodasi (Pelayanan pengasramaan, pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari, perawatan kesehatan dan pengobatan, pemenuhan kebutuhan pakaian, pemenuhan kebutuhan perlengkapan asrama, dll) | Terpenuhinya Kebutuhan dasar sehari-hari (sandang, pangan, papan, dan kesehatan) | Terpenuhinya kebutuhan makan 3x sehari dengan gizi yang memadai, Tercukupinya kebutuhan pakaian harian dan pakaian kerja/ lapangan, PM mendapatkan tempat tinggal yang layak, PM sehat dan dapat mengikuti kegiatan sehari-hari. | |
| 2 | Bimbingan Rehabilitasi Sosial (Bimbingan mental, Bimbingan Agama/Spiritual, Bimbingan Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Sosial Kemasyarakatan) | Penerima Manfaat mampu melaksanakan peran dan fungsi sosialnya secara wajar. | PM memiliki sikap mental yang positif, PM melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, PM Memiliki ketrampilan yang memadai untuk hidup mandiri, PM dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar secara baik dan positif. | |
| 3 | Bimbingan Resosialisasi (kegiatan pelibatan PM dalam mengelola Warung Sosial, <i>Home visit</i> keluarga PM atau lingkungan calon tempat pemulangan, Pemberian peralatan usaha kerja, dan stimulan modal kerja) | PM memiliki kesiapan mental dan ketrampilan untuk kembali ke lingkungan masyarakat, Lingkungan dapat menerima kembali kehadiran PM. | PM memiliki mental yang kuat untuk hidup mandiri, Lingkungan sudah tidak memiliki stigma terhadap PM yang ingin kembali kemasyarakat, PM memiliki pengalaman dalam berwirausaha. | |
| 4 | Bimbingan Lanjut (Penggalian informasi dari stakeholder, Kunjungan lapangan ke eks PM) | Menjaga hasil rehabilitasi sosial agar tetap pada kondisi yang cenderung meningkat. | Eks PM dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar, Eks PM mampu meningkatkan pendapatan hidupnya. | |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data gambar diatas, tugas utama Dinsos dalam menangani gelandangan dan pengemis adalah mendapatkan identitas mereka, seperti KTP,, SIM, dan identitas tambahan seperti asal dan alamat mereka. Dinsos akan memberikan pengarahan dan rehabilitasi sosial untuk mendorong Gepeng agar tidak memilih jalan hidup seperti itu di masa depan, jika mereka memiliki identitas dan tempat tinggal. Selanjutnya, Dinsos akan memberikan Bantuan Sosial (BanSos) kepada Gepeng sesuai anggaran yang telah ditetapkan untuk menangani masalah tersebut. Selanjutnya, jika Gepeng tersebut masih memiliki keluarga, Dinsos akan menghubungi mereka untuk menjemputnya, atau Dinsos akan mengantarkan jika Gepeng tersebut tidak memiliki keluarga. Gelandangan dan pengemis ini akan dibawa ke Shellter PMKS Kabupaten Bojonegoro jika proses pemulangan membutuhkan waktu beberapa hari, karena Gepeng yang ada di Bojonegoro tidak semuanya berasal dari Bojonegoro, Dinsos Bojonegoro akan menghubungi Dinsos terkait sesuai asal Gepeng tersebut. Selain itu, Dinsos Bojonegoro juga akan mendapatkan kiriman Gepeng dari Bojonegoro yang tertangkap dari luar kota. Jika Gepeng sehat dan tidak sakit, prosedur di atas dapat dilakukan.

Dari pelaksanaan kegiatan program rehabilitasi sosial di tahun 2022 Dinas Sosial menargetkan 1,98%. Dimana untuk program rehabilitasi sosial dalam tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 capaian kinerja yaitu sebesar 1.05%, sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja sebesar 0.96%, sehingga dapat disimpulkan bahwa di tahun 2022 mendapat kenaikan sebesar 6,00% dibandingkan tahun 2021.

**Tabel. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir
Periode RENSTRA 2020**

| No | Sasaran strategis | Indikator kinerja | Target 2022 | Realisasi | | |
|----|---|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Tahun 2020 (n-2) | Tahun 2021 (n-1) | Tahun 2022 (n) |
| 1. | Meningkatnya kemampuan PPKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya | Persentase PPKS yang meningkat kemampuan memenuhi | 2,00 | 0,96 | 1,05 | 1,98 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|
| | | hi kebutuha n dasarnya | | | | |
| 2. | Meningkat nya partisipasi PSKS dalam penyeleng garaan kesejahter aan sosial | Persenta se PSKS yang aktif dalam penyelen ggaraan kesejaht eraan sosial | 30,00 | 23,50 | 24,00 | 30,00 |

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Hal ini juga hampir sama dengan pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Operasi dan Pengendalian, yaitu sebagai berikut :

“untuk ketepatan sasaran bagi gelandangan dan pengemis, tetapi ini hanya dalam tahap pembinaan. Karena masih ada kekurangan dari pelatihan dari Dinas Sosial, pelatihannya karena hanya sebatas pembinaan semestara. Biasanya itu pelatihannya kadang ada yang sampai beberapa bulan, namun untuk kendalanya dari gelandangan dan pengemis

sendiri kadang kurangnya pendidikan dan gangguan Disleksia (kesulitan membaca, mengeja, dan menulis)” (hasil wawancara 19 juli 2024).

Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pengemis di Alun – alun Bojonegoro yang pernah ditangkap, pengemis mengatakan bahwa :

“Saya bukan tidak mau dibina, jika hanya saya maka hanya saya yang mendapat fasilitas, bukan seluruh keluarga saya. Tidak itu saja mbak, saya mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang sangat sulit untuk menemukan pekerjaan karena keadaan saya. Jadi jika saya yang dibina saya menerima fasilitas yang cukup, makanan, pelatihan, dan pengobatan. Namun, tanpa mengemis saya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga saya.”

Hal ini juga senada dengan pernyataan dari beberapa masyarakat bahwa :

“menurut saya pribadi memang belum tepat sasaran mbak, kalau pun sudah tepat sasaran mbak gelandangan dan pengemis asli Bojonegoro tidak pindah ke kota lain. Saya kadang melihat gelandangan dan pengemis yang asli dari Bojonegoro itu malah pindah ke kota lain, sedangkan kota lain malah datang ke Bojonegoro mbak” (hasil wawancara pada tanggal 27 Juli 2024”

Berdasarkan dari wawancara dan hasil data gelandangan dan pengemis, peneliti menyimpulkan bahwa dalam ketepatan sasaran adalah sudah tepat sasaran namun belum efektif. Dimana menurut Dinas Sosial bahwa target sasaran dari program tersebut masih belum efektif karena kendala ada di mindset para gelandangan dan pengemis. selanjutnya kendala dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial setelah ditangkap, disanksi, dan kemudian dilepas.. hal itu

menyebabkan gelandangan dan pengemis memiliki strategi baru untuk berpindah tempat dan melaksanakan aksinya.

(2) Sosialisasi Program

Sosialisasi Program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melaksanakan program, informasi pelaksanaannya dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan kelompok sasaran khusus.

Dalam sosialisasi program yaitu Langkah utama untuk meningkatkan kesadaran para gelandangan dan pengemis untuk tidak lagi kembali kejalanan seperti yang diharapkan para pihak penyelenggara sosialisasi, namun seperti yang diutarakan oleh Ibu Eka Puspitasari, S.Sos Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial itu masih berlawanan dengan tujuan sosialisasi program, beliau mengutarakan bahwa :

“sosialisasi program sendiri bagi kita masih susah untuk mensosialisasikan dalam bentuk besar seperti mendatangkan mereka itu sulit, malah hampir tidak mungkin. Kita hanya melakukan ketika mereka di tangkap atau Razia yang diserahkan kepada kami, kami tidak melakukan sosialisasi mereka di kumpulkan di satu lokasi, karena percuma soalnya di jelaskan seperti apapun tetap tidak akan bisa” (hasil wawancara 29 juli 2024).

Tabel 5 Data kegiatan sosialisasi gelandangan dan pengemis

| No | Program | Nama Kegiatan | Tahun | Jumlah sasaran |
|----|---------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial | Sosialisasi gelandangan dan pengemis | 2022 | 29 |
| | | | 2023 | 36 |
| | | | 2024 Jan-Jul | 22 |

Sumber : Data dari Dinas Sosial tahun 2024

GAMBAR 5 SOSIALISASI PROGRAM REHABILITASI



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan sosialisasi tersebut dari tahun ke tahun tingkatnya masih fluktuatif, sehingga dari sosialisasi tersebut dapat dikatakan target sasaran tidak menentu dikarenakan kegiatan sosialisasi dilakukan hanya ketika adanya penangkapan.

Dalam hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Operasi dan Pengendalian, beliau mengatakan :

“pihak Satpol PP hanya mensosialisasikan program hanya saat mereka kita tangkap, itu pun kita juga sudah mensosialisasikan dengan tatap muka. Tetapi mbak, kadang para gelandangan itu tipe nya beda-beda ada yang mendengarkan, ada juga yang sakit, sampai dengan dibawah pengaruh minuman keras”(hasil wawancara 19 Juli 2024).

Namun pernyataan dari beberapa masyarakat berbeda, sebab mereka memang sudah tahu namun masih belum memahami tentang program rehabilitasi sosial.

“saya tahu mbak, namun belum sepenuhnya mengerti program seperti apa saja itu, mungkin kalau pihak Dinas Sosial mensosialisasikan program tersebut kita sebagai masyarakat sebaik mungkin akan membantu untuk

mengurangi atau larangan memberikan uang, ataupun melapor kepada mereka atau satpol pp untuk menangkap mereka” (hasil wawancara pada 27 Juli 2024).

Dari hasil wawancara mengenai sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi program rehabilitasi sosial masih belum bisa dikatakan maksimal sebab dalam pelaksanaan sosialisasi program dan keterlibatan para peserta program, dimana pelaksanaan program masih belum tercapai sesuai rencana. Walaupun dari pihak pelaksana sudah terpenuhi namun tetap saja para pihak peserta masih belum terbilang terpenuhi.

Selain itu juga ada hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial ini yaitu respon dari para peserta program yang kurang optimal, dan cenderung tidak memperdulikan para pihak penyelenggara. Hal ini tentu saja sosialisasi berbentuk apapun yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro belum efektif dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, walaupun dengan melibatkan banyak pihak didalamnya.

(3) Tujuan Program

Tujuan program adalah untuk melihat seberapa dekat hasil program sesuai dengan tujuan program yang ditentukan sebelumnya. Tujuan program rehabilitasi sosial ini

untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang berada di jalan maupun keramaian. Sekaligus agar mereka tidak kembali lagi kejalan, dengan tujuan tersebut agar membuat gelandangan dan pengemis tidak kembali ke jalan namun sepertinya tujuan tersebut belum mencapai tujuan awal yang diharapkan oleh Dinas Sosial seperti yang dikatakan Ibu Eka Puspitasari, S.Sos, selaku Kepala bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa :

“tujuan ya agar gelandangan dan pengemis tidak kembali kejalan tidak mengganggu trantibum, namun mereka itu susah sekali sebelum mereka bisa merubah mindset mereka, jadi mereka sebelum mereka berubah mereka tetap akan kembali dijalan. Jadi itu membuat tujuan program masih sedikit belum tercapai” (hasil wawancara 29 Juli 2024).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, selaku Kasi Pelayanan dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu beliau mengatakan bahwa :

“tujuan itu memang berjalan mbak, namun dari pihak gelandangan dan pengemisnya yang agak susah untuk menaati dan masih kembali” (hasil wawancara 19 Juli 2024).

Menurut dari pernyataan beberapa masyarakat mereka mengungkapkan bahwa tujuan program rehabilitasi ini sudah maksimal.

“hmm..tujuan nya sih bagus ya mbak, mungkin dari pihak-pihak penyelenggara pun sudah maksimal untuk mengurangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Bojonegoro ini” (hasil wawancara pada 27 Juli 2024).

Dari hasil wawancara mengenai tujuan program, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, peneliti

dapat menyimpulkan bahwa tujuan program ini memang sudah berjalan dengan semestinya, namun dari pihak gelandangan dan pengemis yang masih belum dikatakan sudah maksimal. Hal ini membuat tujuan program masih belum maksimal, sehingga membuat gelandangan dan pengemis makin meningkat setiap tahunnya.

(4) Pemantauan Program

Pemantauan program dilakukan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan program ini untuk melihat sejauhmana para gelandangan dan pengemis merespon pihak penyelenggara program untuk tidak kembali kejalan. Dalam melakukan pemantauan pihak penyelenggara adalah Satpol P, rencana pemantauan dengan media sosial seperti whatsapp, facebook, dan Instagram, selain itu Satpol PP dalam pemantuan juga turun ke lapangan untuk menertibkan para gelandangan dan pengemis.

Gambar 2. Layanan Pengaduan Online



Sumber : website Pemkab Bojonegoro

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, selaku Kasi Pelayanan dan Operasi, beliau mengatakan bahwa :

“untuk pemantauan program rehabilitasi Satpol PP sebagai pihak penyelenggara mbak, pakai media sosial dan kemudian ada kegiatan followup mbak dengan terjun kelapangan untuk menertibkan gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya ” (hasil wawancara pada 19 Juli 2024).

Gambar 3. Penangkapan PMKS



Sumber : Instagram Satpol PP

Bagi masyarakat pemantauan program rehabilitasi sosial ini masih belum maksimal sebab terkadang penangkapan gelandangan dan pengemis yang tidak setiap waktu membuat para gelandangan dan pengemis masih enggan untuk pergi dari kawasan tersebut, seperti yang diungkapkan dari beberapa masyarakat :

“kalau saya liat-liat ya mbak, selama ini untuk penangkapan atau razia itu tugas satpol pp selapas itu baru di bawa ke Dinas sosial ya, namun selepas itu mereka tetap di perbolehkan keluar jika salah satu keluarga mereka menjemput, dan setelah itu mungkin baru beberapa bulan lagi baru ada penangkap lagi. Dari situ bisa jadi pihak penyelenggara kurang maksimal untuk pemantauannya ya mbak. Dari saya baca-baca satpol pp juga punya layanan pengaduan melalui online namun mbak mungkin kebanyakan masyarakat juga belum tau hal tentang layanan itu” (hasil wawancara pada 27 Juli 2024).

Dari hasil wawancara mengenai pemantauan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, peneliti menyimpulkan bahwa pemantauan program rehabilitasi yang dilakukan oleh Satpol PP melalui pelayanan pengaduan online pada media sosial dapat dikatakan efektif karena memudahkan untuk penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan aduan masyarakat. Namun, terkait adanya layanan pengaduan online belum masih tersampaikan merata pada masyarakat sehingga dikatakan masih belum maksimal. Walaupun dari pihak pelaksana sudah terpenuhi namun tetap saja para pihak peserta masih belum terbilang terpenuhi dari tujuan awal yang sudah direncanakan.

B. Analisis Data

a. Efektifitas Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pada Dinas Sosial di Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh peneliti pada Efektifitas Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pada Dinas Sosial di Kabupaten Bojonegoro maka peneliti menganalisis sebagai berikut :

1) Ketepatan sasaran

Bahwa pada ketepatan sasaran sudah maksimal namun belum efektif. Dimana menurut Dinas Sosial bahwa target sasaran dari program tersebut masih belum efektif karena kendala ada di mindset para gelandangan dan pengemis. selanjutnya kendala dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial setelah ditangkap, disanksi, dan kemudian dilepas.. hal itu menyebabkan gelandangan dan pengemis memiliki strategi baru untuk berpindah tempat dan melaksanakan aksinya.

2) Sosialisai program

Dalam sosialisasi program rehabilitasi sosial belum bisa dikatakan maksimal sebab dalam pelaksanaan sosialisasi program dan keterlibatan para peserta program, dimana pelaksanaan program masih belum tercapai sesuai rencana. Walaupun dari pihak pelaksana sudah terpenuhi namun tetap saja para pihak peserta masih belum terbilang terpenuhi.

Selain itu juga ada hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial ini yaitu respon dari para peserta program yang kurang optimal, dan cenderung tidak memperdulikan para pihak penyelenggara. Hal ini tentu saja sosialisasi berbentuk apapun yang dilakukan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Bojonegoro belum efektif dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, walaupun dengan melibatkan banyak pihak didalamnya.

3) Tujuan program

Bahwa tujuan program rehabilitasi sosial ini memang sudah berjalan dengan semestinya, namun dari pihak gelandangan dan pengemis sebagai peserta dalam program ini yang masih belum dikatakan maksimal. Hal ini membuat tujuan program yang awalnya bisa maksimal menjadi belum maksimal, sehingga membuat gelandangan dan pengemis makin meningkat setiap tahun.

4) Pemantauan program

Bahwa pemantauan program rehabilitasi yang dilakukan oleh Satpol PP melalui pelayanan pengaduan online pada media sosial dapat dikatakan efektif karena memudahkan untuk penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan aduan masyarakat. Namun, terkait adanya layanan pengaduan online belum masih tersampaikan merata pada masyarakat sehingga dikatakan masih belum maksimal. Walaupun dari pihak pelaksana sudah terpenuhi namun tetap saja para pihak peserta masih belum terbilang terpenuhi dari tujuan awal yang sudah direncanakan.